

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017 - 2022**



Glagahsari No.99 Yogyakarta Kode Pos : 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782
Email : uh@jogjakota.go.id
Email Intra : uh@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.mediainformasiumbulharjo.com



**SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNING
NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Umbulharjo yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

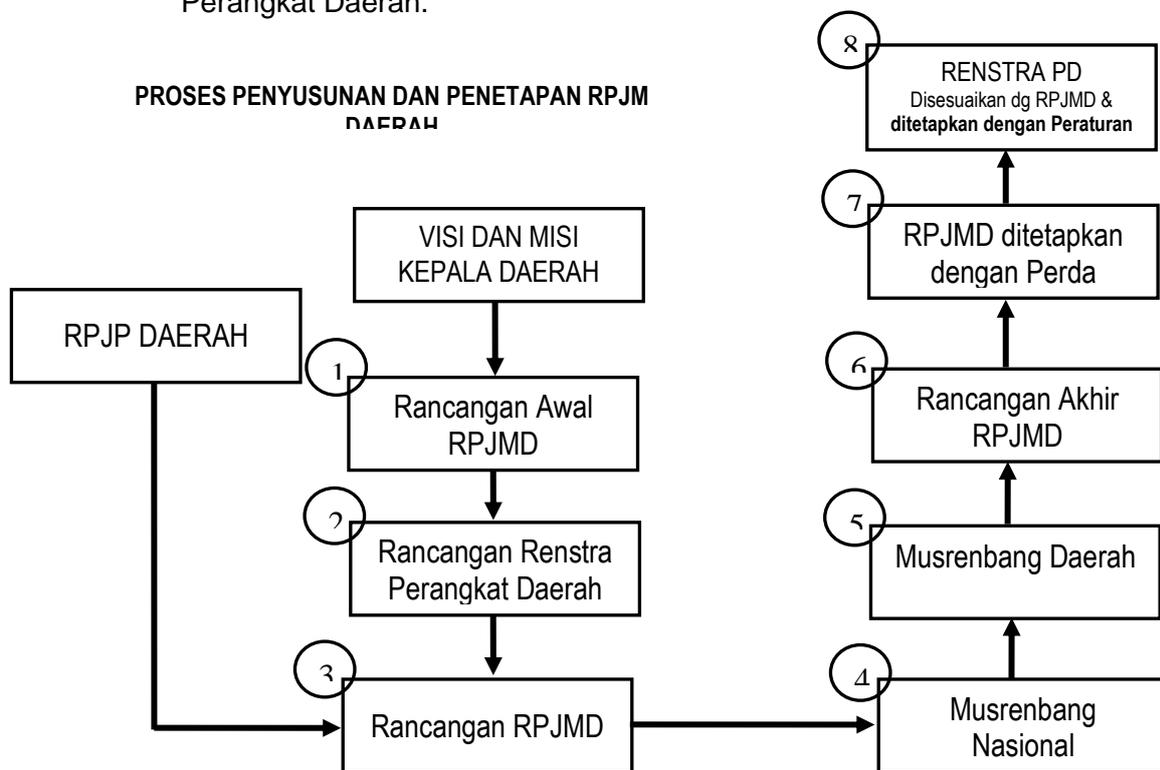
Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah kecamatan Umbulharjo dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural.
 - b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra kecamatan,
 - c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
 - d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
 3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo, Rancangan Renstra adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Kecamatan yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
 4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Umbulharjo menjadi rancangan akhir Renstra Kecamatan Umbulharjo dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Umbulharjo disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.
 5. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Umbulharjo disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kecamatan Umbulharjo untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Perwal No 8 Th 2016 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Perwal No 118 Tahun 2016 ttg Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Umbulharjo

Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 . Dalam pasal 3 (tiga) , disebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

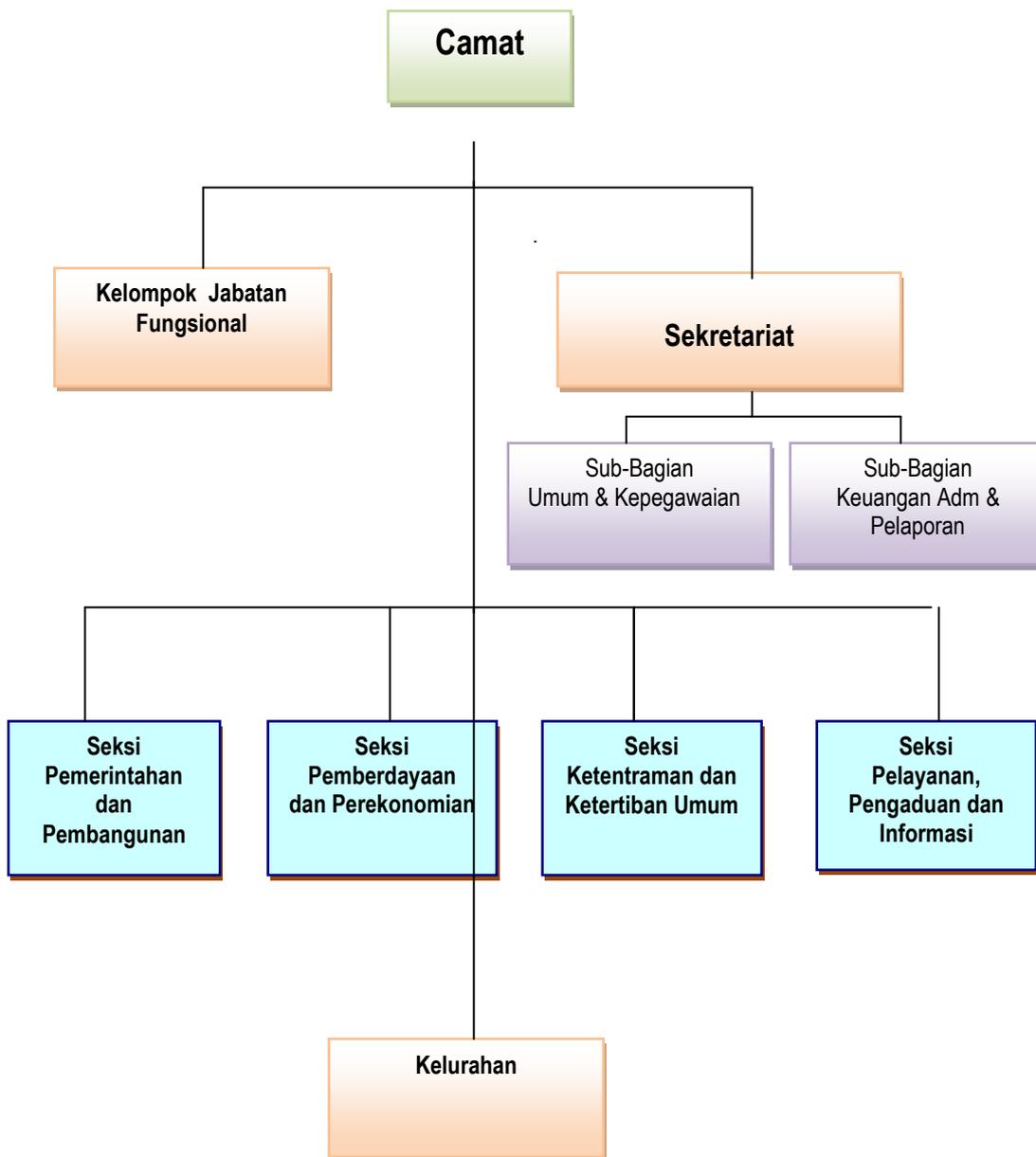
- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Umbulharjo terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - ❖ Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
 - ❖ Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
 - ❖ Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - ❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Umbulharjo sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :



2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo yang mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 62 orang pegawai, terdiri dari 55 orang pegawai tetap (PNS), 7 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis . Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Umbulharjo terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah	: 23 orang
SMA	: 6 orang
D2/3	: 5 orang
S1	: 9 orang
S2	: 3 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah	: 32 orang
SMA	: 15 orang
D2/3	: 4 orang
S1	: 12 orang
S2	: 1 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1	-	-	-	1	1	
2.	Sekcam	-	1	-	-	1	1	
3.	Kasi Kecamatan	1	2	-	2	1	3	Kosong 1
4.	Kasubag	-	2	-	2	-	2	
5.	Jabfung umum kec.	5	4	3	6	-	9	
6.	Naban Kecamatan	3	-	-	-	-	3	
7.	Lurah	5	2	-	5	2	7	
8.	Seklur	2	5	-	7	-	7	
9.	Kasi Kelurahan	9	9	-	18	-	18	
10.	Jabfung umum kel.	4	6	-	6	-	6	
11.	Naban kel.	4	-	-	-	-	4	
	Jumlah							

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural:

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	1	1
2	Diklatpim IV	17	8	9
3	ADUM	20	8	12
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	2	2	-

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	7	2	5
2	S1	21	11	10
3	D III	8	2	6
4	SLTA	25	19	6
5	SLTP	1	1	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	62	35	27

Jumlah Pegawai Kecamatan Umbulharjo berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	10	6	4
4	IV B	27	11	16

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 4**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Umbulharjo**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo (Kecamatan dan kelurahan)	3	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	7	baik
5.	Balai RW	17	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3 (Kecamatan + KTB)	4	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kecamatan + Kelurahan)	22	Baik
9.	Sound System (Kecamatan + Kelurahan)	5	5 baik
10.	Telepon (Kecamatan + Kelurahan)	8	Baik
11.	Faximile (Kecamatan + Kelurahan)	8	5 baik 3 kurang baik
12.	Iphone (ruangan)	4	Baik
13.	Laptop (Kecamatan + Kelurahan)	4	Baik
14.	Komputer (Kecamatan + Kelurahan)	43	baik
15.	Komputer Tablet	1	1 baik
16.	PC Kiosk	1	Rusak

17.	Ruang Rapat (Kecamatan + Kelurahan)	8	Baik
18.	AC	13	11 baik 2 sedang
19.	Air Purifier	2	Baik
20.	Buku Perpustakaan (Kecamatan + Kelurahan)	164	Baik
21.	Almari Besi (Kecamatan + Kelurahan)	26	Baik
22.	Almari Kayu (Kecamatan + Kelurahan)	34	Baik
23.	Kursi Lipat (Kecamatan + Kelurahan)	987	Baik
24.	Meja kerja (Kecamatan + Kelurahan)	104	Baik
25.	Meja Komputer (Kecamatan + Kelurahan)	13	Baik
26.	Meja Pelayanan (Kecamatan + Kelurahan)	3	baik
27.	Kursi Tunggu Pelayanan (Kecamatan + Kelurahan)	10	9 baik 1 sedang
28.	Mesin Ketik (Kecamatan + Kelurahan)	26	baik
29.	Printer (Kecamatan + Kelurahan)	42	baik
30.	Sepeda (Kecamatan + Kelurahan)	14	baik
31.	Kamera (Kecamatan + Kelurahan)	15	Baik

32.	Televisi (Kecamatan + Kelurahan)	8	Baik
33.	Alat Pemadam Kebakaran (Kecamatan + Kelurahan+ RW)	84	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. a. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta periode Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel **2.1**.

Tabel 2.1

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Targ et Indik ator lain	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian tahun ke				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	79,71	-	79,71	79,75	79,79	79,83	80	79,95	79,96	79,99	80,24	80,27	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	100%	100%	100%	100%	120%
3	Meningkatnya Swadaya masyarakat	-	39,64%	-	39,64%	39,69%	39,73%	39,77%	39,81%	28,98%	42,78%	32,56%	31,86%	35,48 %	73,11 %	107,79%	81,95%	80,11%	89,12%

2.3.b Kinerja Keuangan

Tabel 2.2
Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata2 pertumbuhan	
																angg	real
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	827.043.195	1.108.122.000	1.106.077.550	1.240.325.916	1.628.294.567	709.379.211	862.245.181	895,856,311	1.097.751.096,50	1.461.298.143,92	85,77	78	80,99	88,51	89,74	22,70	38,82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170.511.000	342.368.506	284,815,875	426.526.700	377.083.500	135.471.596	236.244.816	236,762,286	269.269.775,00	296.686.550,00	79,45	69	83.13	63.13	78,68	19,76	40,30
Program Peningkatan Kapasitas SDA	Belum ada anggaran	10.000.000	37.500.000	52.500.000	48.510.000	-	10.000.000	37,375,000	52,375,000	46.450.000	-	100	99.67	99.76	95,75	71,28	66,13

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.560.000	12.120.000	52,490,000	58.090.000	29.030.250	7.544.000	11.756.000	25,962,000	36.821.000	12.920.000	99,79	97	49.46	63,39	44,51	53,68	13,44
Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Umbulharjo	66.235.250	282.290.250	347,975,350	720.527.394	794.195.437	47.731.415	216.023.710	255,152,300	649.967.300	636.487.002,70	72,06	77	73.32	90,21	80,14	89,78	14,72

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Kecamatan Umbulharjo akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo ke depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
5. Adanya kebijakan pengetatan terhadap pegawai, diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif pula.
6. Moratorium PNS, yang sampai saat ini banyak pegawai yang mutasi dan pensiun namun tidak ada penggantinya, sehingga masing-masing personil mempunyai rangkap jabatan yang bisa menghambat profesionalitas kerja.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan

3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil

1. Analisa Internal dan Eksternal

- a) Faktor Internal

Kekuatan

- 1) Adanya Kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan internal.
- 2) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 3) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- 4) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 5) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 6) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- 7) Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- 8) Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Umbulharjo dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- 3) Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.

- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.

b) Faktor Eksternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya social, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- 4) Adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, Terminal Giwangan, Pasar Induk Buah dan Sayur, Pasar Ikan Hygienis, Balai Benih Ikan dan XT Square Pusat Seni, Kerajinan dan Kuliner.
- 5) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif dengan jumlah sekolah TK 33, SD 19, SLTP 11,SMU/SMK 9, Perguruan Tinggi 19.
- 6) Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah,alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 8) Adanya sarana kesehatan (Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dll).
- 9) Ditetapkannya Kecamatan Umbulharjo sebagai kawasan tumbuh kembang cepat untuk Yogyakarta wilayah selatan.

Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sector jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.
- 3) Budaya masyarakat peralihan dari agraris menjadi wilayah pengembangan perdagangan dan jasa, khususnya wilayah Umbulharjo selatan.
- 4) Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 .

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Walikota kepada Camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan, dan pembangunan belum mencukup sesuai kompetensi
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kelurahan yang lebih representative

6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab 	UU ASN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya moratorium pegawai. 	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan 	perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan	kurang sosialisasi perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi ketentuan 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal 3. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan 	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	kondisi kantor kurang memadai	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan

	<p>perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan kurang optimal</p> <p>4. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif</p>				
<p>Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Umbulharjo</p>	<p>1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah</p>	<p>Perwal pelimpahan kewenangan , pagu indikatif</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah</p>	<p>1. keterbatasan kewenangan kecamatan</p> <p>2. keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat</p>
<p>Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kecamatan</p>	<p>sarana prasarana wilayah rusak</p>	<p>perwal pelimpahan kewenangan ,</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak</p>	<p>keterbatasan kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran</p>

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur

pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakili dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/ Perangkat.
3. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo yang mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh sebanyak 62 orang pegawai, terdiri dari 55 orang pegawai tetap (PNS), 7 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 2 Tenaga teknis . Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Umbulharjo terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah	: 23 orang
SMA	: 6 orang
D2/3	: 5 orang
S1	: 9 orang
S2	: 3 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah	: 32 orang
SMA	: 15 orang
D2/3	: 4 orang
S1	: 12 orang
S2	: 1 orang

Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Umbulharjo telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (tabel 3.2)

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, visi Walikota Yogyakarta adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Umbulharjo adalah misi pertama, yaitu “.Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat”

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Kualitas sumber daya manusia meningkat
 - Kemiskinan masyarakat menurun
 - Kondusifitas iklim investasi meningkat
 - Pendapatan daerah meningkat
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dengan sasaran :
 - Pengangguran terbuka menurun
 - Pendapatan masyarakat meningkat
- c. Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif dengan sasaran
 - Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat
- d. Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran :
 - Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
 - Pencemaran lingkungan hidup terkendali
- f. Meningkatkan Kualitas pendidikan dengan sasaran :
 - Daya serap sistem pendidikan meningkat
- g. Meningkatkan Usia harapan hidup dengan sasaran :
 - Kesehatan keluarga meningkat
- h. Meningkatkan pariwisata berbasis budaya dengan sasaran :
 - Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman dengan sasaran :
 - Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran :
 - Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Walikota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. 4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga masih 	<p>Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan</p> <p>Tidak memiliki kewenangan pengadaan Sumber Daya Manusia</p> <p>Adanya output kegiatan Perangkat Daerah lain yang berada di Kecamatan</p> <p>Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada belum</p>	<p>Dukungan lembaga kemasyarakatan</p> <p>Kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai analisa jabatan</p> <p>Mendekatkan pelayanan masyarakat</p> <p>Integritas Sumber Daya</p>

<p>terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.</p>	<p>optimal</p>	<p>Manusia</p>
<p>5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p>	<p>Tugas pembantuan Perangkat Daerah lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat</p>
<p>6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat</p>	<p>Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p>	<p>Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p>
<p>7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p>	<p>Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.a. Telaahan Renstra K/L

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%

		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase	100%	100%

			pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	provinsi 5% Kab/kota	provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan	30 prop. 250	30 prop. 300

			akuntansi berbasis akrual	Kab/kota	Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya	1	Persentase lulusan	50%	85%

	kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri		IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental		
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak terlibat secara langsung dengan pelayanan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hanya dalam peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga di tingkat Kecamatan sangat diperlukan. Selain itu tertib administrasi juga sangat penting dalam penegakan Integritas Bebas korupsi. Terkait dengan hal tersebut

permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra K/L adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Membantu Dinas Kependudukan meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah ◆ Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah 	Kegiatan forkopimcam perlu dipertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

3.3.b. Telaah Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta memaknai Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri sebagai kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Banyak benang merah yang dapat ditarik dari Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya dengan keyakinan yang cukup bahwa kinerja Perangkat daerah Kecamatan Umbulharjo akan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DIY. Selanjutnya permasalahan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Propinsi

Sasaran Renstra Propinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p><i>Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 2. Melek huruf masyarakat meningkat. 3. Aksesibilitas pendidikan meningkat. 	<p>Kurang optimalnya pelaksanaan kewenangan pembinaan kelompok seni</p>	<p>Adanya kelompok seni</p>	<p>Minat pengembangan seni masyarakat kurang optimal</p>

4. Daya saing pendidikan meningkat.			
5. Harapan hidup masyarakat meningkat.			
<p><i>Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan tujuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan masyarakat meningkat. 2. Ketimpangan antar wilayah menurun. 3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 4. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 	<p>Belum optimalnya Program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan pada tingkat kecamatan / kelurahan</p>	<p>Organisasi kemasyarakatan sebagai stakeholder s dapat diperankan lebih optimal</p>	<p>Masih kurangnya pemahaman terhadap misi penanggulangan kemiskinan</p>
<p><i>Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 	<p>Kurangnya SDM menyebabkan keterlambatan serapan / realisasi anggaran</p>	<p>Paraturan terkait keuangan</p>	<p>Pemahaman terkait teknis pelaporan belum optimal</p>
<p><i>Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat 3. Pemanfaatan ruang terkendali. 	<p>Kurang tegasnya penegakan Perda terkait pemanfaatan ruang</p>	<p>Adanya petugas / Pol Pamong Praja</p>	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang belum sesuai dengan aturan</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata . Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup

dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kawasan Umbulharjo dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sub pusat pelayanan yaitu mendukung pusat pelayanan kota yang diarahkan kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai kawasan tumbuh cepat ekonomi. Pola ruang adalah sebagai kawasan budidaya dengan pola pengembangan lebih fleksibel dan intentasi yang tinggi maupun agak tinggi (dapat dikembangkan dengan maksimal). Pemanfaatan pola ruang didominasi permukiman dan perdagangan yang dapat dikembangkan pada skala regional. Kecamatan ini terlewati dua sungai dari tiga sungai utama yaitu code dan Gajah Wong, terdapat sebagian Kebun Binatang Gembira Loka, terletak Stadion Mandala Krida, beberapa lapangan kecil serta beberapa persawahan sehingga merupakan kecamatan dengan dukungan kawasan lindung alami dan RTH yang cukup berarti.

3.4.1 Telaahan Dokumen KLHS

Tabel 3.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa, dan industri. Padat penduduk dan bangunan sehingga kawasan terbangun akan melebar ke wilayah Sleman dan Bantul	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada.	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana kawasan Sleman sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada: Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi kebijakannya
4.	Efisiensi pemanfaatan	Memelihara kawasan sumber	Pengaduan masyarakat	Program diarahkan pada:

	Sumber Daya Alam	air (konservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah	terhadap ketersediaan sumber air tanah	Penyelamatan sumber air tanah di Yogyakarta
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan

daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air

tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan Industri Logam	pencemaran lingkungan	permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang	Kurangnya kepedulian sebagian warga masyarakat terhadap penataan lingkungan	Sosialisasi dan penyuluhan masih kurang	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan
1. Belum ada kebijakan khusus untuk pengelolaan sumberdaya air Kabupaten	1. Kurangnya informasi tentang kualitas sumber air sumur gali maupun mata air di	Kurangnya pemahaman warga masyarakat terhadap kualitas air sumur gali maupun mata air	Fasilitas laboratorium untuk mengetahui kualitas air

Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	sepanjang Sungai Code		
2. Kurangnya sarana peresapan air hujan	2. Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana resapan air hujan yang sudah ada	Ketersediaan sarana resapan air hujan
3. Kurangnya monitoring pencemaran air tanah dan air sungai	3. Pengaduan tentang kualitas air	Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan air bersih	Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan
4. Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum tergerak masif	4. Masih kurang melembaganya kesadaran terhadap lingkungan	Kurangnya relawan terhadap upaya membangun kesadaran sosial terhadap lingkungan	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera

diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun

dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

(Tabel 3.7)

HASIL TELAAH STRUKTUR RUANG WILAYAH

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pendukung kawasan wisata budaya	Kawasan wisata budaya di wilayah XT square, Kampung Wisata Tahunan, Warungboto dan Pandeyan, serta ditambah indahnya kawasan penataan kampung kumuh di bantaran	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada

	sungai Gadjah wong Giwangan dan Pandeyan.			
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai Code, sungai Manunggal dan Sungai Gadjah Wong.	Kawasan hunian bantaran Sungai Code, sungai Manunggal dan Sungai Gadjah Wong	Penataan kawasan bantaran Sungai Code, sungai Manunggal dan Sungai Gadjah Wong	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Perangkat Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Umbulharjo dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat daerah Kecamatan Umbulharjo yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki kerawanan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kawasan pelestarian cagar budaya	Kawasan pelestarian cagar budaya	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code	Penataan kawasan bantaran Sungai Code	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

			bencana	
--	--	--	---------	--

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Umbulharjo sangat fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Umbulharjo agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan wisata budaya	Kurangnya kesiapan warga masyarakat terhadap tamu wisatawan dari luar	Kurangnya kesiapan warga dalam memenuhi fasilitas secara konsisten terhadap wisatawan	Kampung wisata yang mendapat support anggaran
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai terutama bantaran sungai Code dan Gadjah wong	Masih terdapat warga masyarakat di kawasan bantaran sungai yang belum memiliki hunian yang layak	- Sudah ada percontohan penataan Kampung Kumuh di bantaran wilayah Giwangan dan Pndeyan

			<p>dengan anggaran dari Pemerintah Pusat.</p> <p>- Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati sungai</p>
--	--	--	--

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik)

kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang

berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana Gedung kantor Kecamatan Umbulharjo, supaya lebih representatif, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi dan arena bermain anak, kamar mandi untuk umum dan difable, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan. Dan Tahun 2017 di akhir tahun semua Kantor Kelurahan terdapat CCTV untuk menunjang

keamanan lingkungan. Dengan demikian CCTV tidak hanya di Kantor Kecamatan saja, namun juga terpasang di semua Kelurahan se Kecamatan Umbulharjo.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Semaki, Muja-muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan dan Giwangan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Umbulharjo yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam

pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Siaga Bencana Banjir lahar dingin sungai Code

Beberapa kali sebagian wilayah di Kecamatan Umbulharjo terutama di bantaran Sungai Code, Gajah Wong dan Sungai Manunggal terkena dampak banjir lahar. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

d. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Umbulharjo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

g. Isu-Isu Strategis

Dari paparan permasalahan di atas perlu adanya identifikasi dan klasifikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada lima tahun kedepan. Penanganan permasalahan untuk mencapai hasil yang optimal perlu langkah-langkah yang konkrit dan strategis. Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo antara lain :

1. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat

komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.

Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi.

3. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Umbulharjo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo”

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 355.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Umbulharjo menetapkan sasaran sebagai berikut: “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo”. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 355.

(Tabel 4.1)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	351	352	353	354	355

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Umbulharjo menunjukkan bagaimana cara PD Kecamatan Umbulharjo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi PD Kecamatan Umbulharjo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup PD. Strategi juga merupakan cara/

langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulharjo ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharj	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta meliputi :

6.1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatan :

1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

6.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur :

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.1.4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan:

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.5 Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Semaki
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat kel. Muja-muju
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Tahunan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. Warungboto
7. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kel. Pandeyan

8. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat kel. Sorosutan
9. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan
10. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 .

Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Kecamatan Umbulharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			URUSAN WAJIB																		
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																		
Meningkatkan Pembangunan Umbulharjo	Perkembangan Kecamatan Umbulharjo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	350		351		352			353		354		355		355		Kec. UH
		02.07.13.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.262.146.298	100%	1.617.754.825	100%	1.359.894.617	100%	1.400.691.456	100%	1.442.712.199	100%	1.485.993.565	100%	8.762.166.746		Kec. UH
		02.07.13.001.018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia																	
				a. Makan minum harian Pegawai	73 orang	73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		438 orang	

				b.Makan minum rapat koordinasi	20 macam	20 macam		120 macam									
				c.Makan minum tamu kunjungan	1080 orang	1080 orang		6480 orang									
				d.Makan minum harian umum	11 bulan	11 bulan		66 bulan									
		02.07.13.001.019	Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	Jasa Piket Kantor	12 bulan	12 bulan		72 bulan									
				Alat Tulis Kantor yang tersedia	93 macam	93 macam		78 macam		78 macam		78 macam		78 macam		483 macam	
				Alat Listrik dan elektronik yang tersedia	16 macam	16 macam		12 macam		12 macam		12 macam		12 macam		72 macam	
				Materai 3000 yang tersedia	1750 buah	1750 buah		10500 buah									
				Materai 6000 yang tersedia	370 buah	370 buah		380 buah		380 buah		380 buah		380 buah		2270 buah	
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	28 macam	28 macam		29 macam		29 macam		29 macam		29 macam		173 macam	
				Bahan bakar minyak dan gas yang tersedia	40 liter	40 liter		240 liter									
				Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	90 unit	90 unit		70 tabung		90 tabung		90 tabung		90 tabung		520 tabung	
				Jasa Bahan Komputer/Printer	10 macam	10 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		45 macam	
				Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	9 macam	9 macam		6 macam		6 macam		6 macam		6 macam		39 macam	

Jasa Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan		72 bulan										
Jasa Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 bulan		72 bulan										
Jasa Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan		72 bulan										
Jasa Retribusi Kebersihan	12 bulan	12 bulan		72 bulan										
Langganan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan		72 bulan										
Jasa STNK Roda 4	1 unit	1 unit		6 unit										
Jasa STNK Roda 3	4 unit	4 unit		24 unit										
Jasa STNK Roda 2	22 unit	22 unit		22 unit		23 unit		23 unit		23 unit		23 unit		136 unit
Barang Cetak	6 macam	6 macam		3250 lembar		6 macam 16250 lembar								
Penggandaan	354850 lembar	354850 lembar		2129100 lembar										
Jilid	328 bdl	328 bdl		195 bdl		1303 bdl								
Jasa Sewa Kursi	1800 buah	1800 buah		1000 buah		6800 buah								
Jasa Sewa Meja	195 buah	195 buah		100 buah		695 buah								
Jasa Sewa Taplak	195 lembar	195 lembar		100 buah		695 buah								
Jasa Sewa Tenda	6 unit	6 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		81 unit
Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan	7 unit	7 unit		5 unit		32 unit								
Bij Modal Alat Kantor	33 macam	33 macam		9 item		78 item								

		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahanggaan/Komunikasi/Studio	7 macam	7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		42 macam		
		Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan	51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		306 unit		
02.07.13.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis			4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		24 jenis		
		Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	71 ASN	71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		426 ASN		
		Jasa Pengelola Ansip	1 orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		6 org		
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		42 org		
02.07.13.002	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				427.203.675		290.035.039		298.736.090		307.696.172,88		316.929.118		326.436.992		1.967.039.067	Kec. UH
02.07.13.002.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor																	
		pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		6 unit%		
		pemeliharaan gedung kantor	8 unit	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		18 jenis		
		pemeliharaan mebelair	6 macam	3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		18 macam		

02.07.13.002.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4	6 unit											
	Dinas / Operasional		4 unit roda 3	24 unit											
			22 unit roda 2	22 unit roda 2	22 unit roda 2	23 unit roda 2	136 unit								
02.07.13.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja			82.353.750	7.433.750	7.656.763	7.886.465	8.123.059	8.366.751	121.820.538	Kec. UH				
02.07.13.006.005	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RK, RKA, DPA)	5 dokumen	30 dokumen											
		Laporan Kinerja OPD LKIP, Laporan Keuangan dan Fiskal, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	30 dokumen											
02.07.13.062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo			4.277.356.188	4.870.298.401	5.016.407.353	5.166.899.574	5.321.906.561	5.481.563.758	##### ##	Kec. UH				

02.07.13.062.001

Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	16 dokumen	96 dokumen									
	Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW	2040 RT 522 RW	
	Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	28	
	Sinergitas Kelembagaan Kelurahan (Penyuluhan & Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda)	200 org	1200 org									
	Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran Perda	12 bulan	72 bin									
	Penataan dan Penertiban PKL	12 bulan	72 bin									
	Penyuluhan LINMAS	480 org	2880 org									
	Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus	1 kali	6 kali									
	Sambang kampung	14 kali	84 kali									
	Operasi Keteriban	12 bulan	72 bin									

02.07.13.062.002

	Operasi Vandalisme	12 bulan	12 bulan		72 bin											
	Pengamanan Umum	10 kegiatan	10 kegiatan		60 kegiatan											
	Operasi Gepeng	12 bulan	12 bulan		72 bin											
	Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA	7 kelurahan	7 kelurahan		28											
	Penyuluhan KTB	50 org	50 org		300 org											
	Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	50 org	50 org		300 org											
	Pemilihan dan Pengukuhan RT, RW dan LPMK	7 kelurahan	7 kelurahan		28											
	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo															
	Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 jenis	5 jenis		30 jenis											
	Pelayanan Administrasi Terpadu	11 bin	11 bin		66 bh											
	Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan	435 orang	435 orang		2610 orang											
	Jasa Tenaga Tekhnis	11 bulan	11 bulan		66 bin											
	Inovasi Kecamatan	2 bulan	2 bulan		12 bulan											
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat															

02.07.13.062.003

Kecamatan Umbulharjo

TKPK	8 bulan	48 bulan									
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	48 bulan									
Pentas Seni dan Budaya	1 kali	6 kali									
Karnaval Budaya	1 kali	6 kali									
Lomba Bidang Kesehatan	1 kali	6 kali									
Gebyar PAUD	1 kali	6 kali									
Evaluasi Ketersian Data PKK	4 bulan	24 bulan									
Ketahanan Pangan	4 bulan	24 bulan									
Gerakan Sapaan Anak Kos	6 bulan	36 bulan									
Lomba KKG PKK	1 kali	6 kali									
Sosialisasi dan sarasehan PKK	5 kali	30 kali									
Bintek Administrasi PKK	40 orang	240 orang									
Koordinasi Forum Kecamatan	15 forum	90 forum									
Pentas Mocoplat	1 kali	6 kali									

02.07.13.062.004

**Pembinaan Ekonomi, Sosial
dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Giwangan**

Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-Posyandu-SD/DTK	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	180 org
Gelegar Kecamatan Umbulharjo	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	12 hari
Pembina JBM	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	24 bulan
Pembinaan Kelurahan Siaga	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	4 bulan	24 bulan
Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	240 orang
Sosialisasi Ketahanan Pangan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	180 orang
Sarasehan Mocopat	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	24 kali
Pelatihan Perencanaan Bagi Kader PKK	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	240 orang
Pelatihan Packaging	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	180 orang
Gelar Poetrnsi Difabel	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	6 kali
Penyuluhan Pengelola UKS	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	360 org
Penyuluhan PKH	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1800 orang
Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 42 RT	4 bulan, 42 RT	10 bulan, 42 RT	54 bulan 252 RT							

Jam Belajar Masyarakat	13 RW	13 RW		78 RW										
Workshop RW Siaga	1 kali	1 kali		6 kali										
Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		30 kali										
Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW		78 RW										
sarasehan PKK RT	42 RT	42 RT		252 RT										
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	30 orang	30 orang		180										
Penyusunan RPJMD Kelurahan Gwangangan	1 kali	1 kali		6 kali										
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		48 bulan										
Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang		1200 orang										
Worshop Kampung Wisata	30 orang	30 orang		180 orang										
BIMTEK Kampung Wisata	40 orang	40 orang		240 orang										
Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K	70 orang	70 orang		420 orang										
Sosialisasi Hartinya PKK dan PHBS	70 orang	70 orang		420 orang										
Gebyar Lansia	200 orang	200 orang		1200 orang										
Upaca Adat Nyadran	1 kali	1 kali		6 kali										
Pelatihan Sablon Tingkat Dasar	30 orang	30 orang		180 orang										

02.07.13.062.005

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 70 RT	4 bulan, 70 RT	10 bulan, 70 RT	54 bulan 420 RT					
	Jam Belajar Masyarakat	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	108 RW
	Sosialisasi RW Siaga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	6 kali
	Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	30 kali
	Sarasehan PKK RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	18 RW	108 RW
	Sarasehan PKK RT	70 RT	70 RT	70 RT	70 RT	70 RT	70 RT	70 RT	70 RT	420 RT
	Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan makanan tradisional)	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	240 orang
	Penyusunan RPJMD Kelurahan Sorosutan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	6 kali
	Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	48 bulan
	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1500 orang
	Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	180 orang
	Pelatihan Rias Karakter	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang
	Pelatihan hantaran Mantan Tingkat Lanjut	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang

02.07.13.062.006

Pelatihan Pembuatan Blankon	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Pelatihan Pembuatan sekam untuk Media Tanam	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Pelatihan Buddaya Tanaman Sayuran	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK)	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang	
Gerakan Sapaan Anak Kos	18 RW, 4 bulan	18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		108 RW	
Penen Raya (April dan Desember)	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		12 kali	
Gebyar Lansia	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang	
Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang	
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 4 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		54 bulan 260 RT								
	Jam Belajar Masyarakat	8 bin	8 bin		8 bin		8 bin		8 bin		8 bin		8 bin		48 bulan
	Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
	Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali

02.07.13.062.007

Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW		78 RW												
Sarasehan PKK RT	52 RT	52 RT		312 RT												
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	40 orang	40 orang		240 orang												
Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan	1 kali	1 kali		6 kali												
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		48 bulan												
Pelatihan Pemanfaatan Perlatan KTB	30 orang	30 orang		180 orang												
Worshop Sosio Entrepreneurship	30 orang	30 orang		180 orang												
Gelar Potensi Anak	150 orang	150 orang		900 orang												
Lomba Futsal Karang Taruna	13 RW	13 RW		78 RW												
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe	22 orang	22 orang		132 orang											
	Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca	22 orang	22 orang		132 orang											
	Promosi hasil Karya	1 hari	1 hari		6 hari											
	Pelatihan Bisnis Berbasis Web	22 orang	22 orang		132 orang											
	Sosialisasi Kesehatan Lansia	50 orang	50 orang		300 orang											

Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Solusinya	70 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		420 orang
Gelar Potensi PAUD	110 orang	110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		660 orang
Pelatihan Daur Ulang Sampah	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang
Gelar Senam Suka-suka	300 orang	300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		1800 orang
Gelar Potensi Lansia	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
Pelatihan Membuat Tas Rajut	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang
Jam Belajar Masyarakat	9 RW	9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		54 RW
Lomba Balita Tingkat Kelurahan	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		600 orang
Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 4bulan		1 kali, 10 bulan		54 bulan								
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar)	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali
Sarasehan PKK RW	9 RW	9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		54 RW
Sarasehan PKK RT	38 RT	38 RT		38 RT		38 RT		38 RT		38 RT		38 RT		228 RT

02.07.13.062.008

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 4bulan		1 kali 10 bulan		54 bulan								
	Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		72 RW
	Sosialisasi Kelurahan Siega	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
	Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
	Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali
	Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		72 RW
	Sarasehan PKK RT	50 RT	50 RT		50 RT		50 RT		50 RT		50 RT		50 RT		300 RT
	Intervensi Penduduk Rentan /Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar bagi Pemegang KMS)	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
	Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan
	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang
	Sarasehan Budaya Jawa	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		300 orang
Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan	100 buku	100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		600 buku	
Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang	

02.07.13.062.009

				Pelatihan Jemputan Warna Alam	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				Pelatihan Batik Tulis	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
				Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal Batik	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju				Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 4 bulan		1 kali 10 bulan		54 bulan								
				Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		72 RW
				Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
				Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali
				Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		72 RW
				Sarasehan PKK RT	55 RT	55 RT		55 RT		55 RT		55 RT		55 RT		55 RT		330 RT
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan makanan dari Umbi-Umbian)	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
				Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan
				Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang
				Pelatihan Manajemen Usaha	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang

02.07.13.062.010

**Pembinaan Ekonomi, Sosial
dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Semaki**

Workshop Kesehatan Bagi Lansia	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Pelatihan Pembuatan Ecobrik	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Pelatihan Pembuatan Makanan dari Ikan	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Workshop Posyandu	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		300 orang
Gelar Senam PKK	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali
Workshop Parenting PAUD	65 orang	65 orang		65 orang		65 orang		65 orang		65 orang		65 orang		390 orang
Workshop PIK R	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Pelatihan SDIDTK	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Pelatihan Pemanfaatan Perlatan KTB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Workshop Kampung Cyber	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang
Penyuluhan dan pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali/ 10 bulan	1 kali/ 4 bulan		1 kali/ 10 bulan		54 bulan								
Jam Belajar Masyarakat	10 RW	10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		60 RW
Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali
Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali
Sarasehan PKK RW	10 RW	10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		10 RW		60 RW
Sarasehan PKK RT	34 RT	34 RT		34 RT		34 RT		34 RT		34 RT		34 RT		204 RT

02.07.13.062.011

Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan Kue)	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	180 orang	
Penyusunan RPJMD Kelurahan Semaki	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	6 kali	
Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	8 bulan	48 bulan	
Pelatihan Hydroponik	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang	
Pelatihan Pembuatan Bakpia	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang	
Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	120 orang	
Gelar Potensi PAUD	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	600 orang	
Pelatihan Kegawat Daruratan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	300 orang	
Gelar Potensi Lansia	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	600 orang	
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 dokumen	48 dokumen								
	Perbaikan Paving Blok	6 bulan	36 bulan								
	Perbaikan SAH	6 bulan	36 bulan								
	Perbaikan balai RW	6 bulan	36 bulan								
	Pemasangan Kanopi Ex Balai RK	1 paket	6 paket								
	Pemeliharaan taman Apotik Hidup	1 paket	6 paket								
	Pemeliharaan PUJ	7 kelurahan	28								

				Pelatihan Perencanaan	102 orang	102 orang		612 orang									
				Pelatihan Kader Pembangunan	35 orang	35 orang		210 orang									
				Profil Kecamatan dan Kelurahan	4 bulan	4 bulan		24 bulan									
				Informasi Pembangunan Wilayah	6 bulan	6 bulan		36 bulan									
				Gelar Expo Industri	3 hari, 7 kel	3 hari, 7 kel		18 hari, 28 kel									
				Penyuluhan PKL	400 orang	400 orang		2400 orang									
				Penyuluhan Pemilik Pondokan	200 orang	200 orang		1200 orang									
				Sosialisasi bahan makanan berbahaya	50 orang	50 orang		300 orang									
				Koordinasi UMKM	11 bulan	11 bulan		66 bulan									

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat.	350	350	351	352	353	354	355	355

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Kelurahan di wilayah Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			URUSAN WAJIB																				
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	350		351		352		353		354		355		355			Kec. UH	Kec. UH	
		02.07.13.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.752.588.873	100%	1.320.286.036	100%	1.359.894.617	100%	1.400.691.456	100%	1.442.712.199	100%	1.485.993.565	100%	8.762.166.746			Kec. UH	Kec. UH
		02.07.13.001.015	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia																			
				a. Makan minum harian Pegawai	73 orang	73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		73 orang		438 orang					
				b.Makan minum rapat koordinasi	20 macam	20 macam		20 macam		20 macam		20 macam		20 macam		20 macam		120 macam					
				c.Makan minum tamu kunjungan	1080 orang	1080 orang		1080 orang		1080 orang		1080 orang		1080 orang		1080 orang		6480 orang					
				d.Makan minum harian umum	11 bulan	11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		66 bulan					
		02.07.13.001.015	Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	Jasa Piket Kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan					
				Alat Tulis Kantor yang tersedia	93 macam	93 macam		78 macam		78 macam		78 macam		78 macam		78 macam		483 macam					
				Alat Listrik dan elektronik yang tersedia	16 macam	16 macam		12 macam		12 macam		12 macam		12 macam		12 macam		72 macam					
			Materai 3000 yang tersedia	1750 buah	1750 buah		1750 buah		1750 buah		1750 buah		1750 buah		1750 buah		10500 buah						
			Materai 6000 yang tersedia	370 buah	370 buah		380 buah		380 buah		380 buah		380 buah		380 buah		2270 buah						
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	28 macam	28 macam		29 macam		29 macam		29 macam		29 macam		29 macam		173 macam						
			Bahan bakar minyak dan gas yang tersedia	40 liter	40 liter		40 liter		40 liter		40 liter		40 liter		40 liter		240 liter						
			Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	90 unit	90 unit		70 tabung		90 tabung		90 tabung		90 tabung		90 tabung		520 tabung						
			Jasa Bahan Komputer/Printer	10 macam	10 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		45 macam						
			Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tanggal/Kerja yang tersedia	9 macam	9 macam		6 macam		6 macam		6 macam		6 macam		6 macam		39 macam						
			Jasa Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan						
			Jasa Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan						
			Jasa Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan						
			Jasa Retribusi Kebersihan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan						
			Langganan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan						
			Jasa STNK Roda 4	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		6 unit						
			Jasa STNK Roda 3	4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		24 unit						
			Jasa STNK Roda 2	22 unit	22 unit		22 unit		23 unit		23 unit		23 unit		23 unit		136 unit						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Barang Celakan	6 macam	6 macam		3250 lembar		3250 lembar		3250 lembar		3250 lembar		3250 lembar		16250 lembar			
				Pengandaan	354850 lembar	354850 lembar		354850 lembar		354850 lembar		354850 lembar		354850 lembar		354850 lembar		2129100 lembar			
				Jilid	328 bdl	328 bdl		195 bdl		195 bdl		195 bdl		195 bdl		195 bdl		1303 bdl			
				Jasa Sewa Kursi	1800 buah	1800 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		6800 buah			
				Jasa Sewa Meja	195 buah	195 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		695 buah			
				Jasa Sewa Taplak	195 lembar	195 lembar		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		695 buah			
				Jasa Sewa Tenda	6 unit	6 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		81 unit			
				Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan	7 unit	7 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		32 unit			
				Biji Modal Alat Kantor	33 macam	33 macam		9 item		9 item		9 item		9 item		9 item		78 item			
				Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah Tanggahan/Komunikasi/Studio	7 macam	7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		7 macam		42 macam			
				Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan	51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		306 unit			
		02.07.13.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis			4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		24 jenis			
				Dokumen Administrasi Kepegawain yang dikelola	71 ASN	71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		71 ASN		426 ASN			
				Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		6 org			
				Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		42 org			
		02.07.13.002	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				427.203.675		290.035.039		298.736.090		307.698.172,88		316.929.118		326.436.992		1.967.039,087	Kec. UH	Kec. UH
		02.07.13.002.020	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		6 unit%			
				pemeliharaan gedung kantor	8 unit	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		18 jenis			
				pemeliharaan mebelair	6 macam	3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		3 macam		18 macam			
		02.07.13.002.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4	1 unit roda 4		1 unit roda 4		1 unit roda 4		1 unit roda 4		1 unit roda 4		1 unit roda 4		6 unit			
					4 unit roda 3	4 unit roda 3		4 unit roda 3		4 unit roda 3		4 unit roda 3		4 unit roda 3		4 unit roda 3		24 unit			
					22 unit roda 2	22 unit roda 2		22 unit roda 2		23 unit roda 2		23 unit roda 2		23 unit roda 2		23 unit roda 2		136 unit			
		02.07.13.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja				82.353.750		7.433.750		7.656.763		7.886.465		8.123.059		8.366.751		121.820.538	Kec. UH	Kec. UH
		02.07.13.006.005	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		30 dokumen			
				Laporan Kinerja OPD LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		30 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.07.13.062	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo				4.277.356.188		4.870.298.401		5.016.407.353		5.166.899.574		5.321.906.561		5.481.563.758		30.134.431.834	Kec. UH	Kec. UH
		02.07.13.062.001	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertarikan dan Ketertarikan Masyarakat	Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	16 dokumen	16 dokumen			16 dokumen		96 dokumen										
				Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW			340 RT, 87 RW		2040 RT 522 RW										
				Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan			7 kelurahan		28										
				Sinergitas Kelembagaan Kelurahan (Penyuluhan & Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda)	200 org	200 org			200 org		1200 org										
				Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran Perda	12 bulan	12 bulan			12 bulan		72 bln										
				Penataan dan Penertiban PKL	12 bulan	12 bulan			12 bulan		72 bln										
				Penyuluhan LINMAS	480 org	480 org			480 org		2880 org										
				Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus	1 kali	1 kali			1 kali		6 kali										
				Sambang kampung	14 kali	14 kali			14 kali		84 kali										
				Operasi Ketertiban	12 bulan	12 bulan			12 bulan		72 bln										
				Operasi Vandalisme	12 bulan	12 bulan			12 bulan		72 bln										
				Pengamanan Umum	10 kegiatan	10 kegiatan			10 kegiatan		60 kegiatan										
				Operasi Gepeng	12 bulan	12 bulan			12 bulan		72 bln										
				Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA	7 kelurahan	7 kelurahan			7 kelurahan		28										
				Penyuluhan KTB	50 org	50 org			50 org		300 org										
				Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	50 org	50 org			50 org		300 org										
				Pemilihan dan Pengukuhan RT, RW dan LPMK	7 kelurahan	7 kelurahan			7 kelurahan		28										
		02.07.13.062.002	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 jenis	5 jenis			5 jenis		30 jenis										
				Pelayanan Administrasi Terpadu	11 bln	11 bln			11 bln		66 bh										
				Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan	435 orang	435 orang			435 orang		2610 orang										
				Jasa Tenaga Tekhnis	11 bulan	11 bulan			11 bulan		66 bln										
				Inovasi Kecamatan	2 bulan	2 bulan			2 bulan		12 bulan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.07.13.062.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	TKPK	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan			
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan			
				Pentas Seni dan Budaya	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Karnaval Budaya	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Lomba Bidang Kesehatan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Gebyar PAUD	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Evaluasi Keterisian Data PKK	4 bulan	4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		24 bulan			
				Ketahanan Pangan	4 bulan	4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		24 bulan			
				Gerakan Sapaan Anak Kos	6 bulan	6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		36 bulan			
				Lomba KKG PKK	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Sosialisasi dan sarasehan PKK	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali			
				Bintek Administrasi PKK	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang			
				Koordinasi Forum Kecamatan	15 forum	15 forum		15 forum		15 forum		15 forum		15 forum		15 forum		90 forum			
				Pentas Mocopat	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-Posyandu-SDIDTK	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 org			
				Gelegar Kecamatan Umbulharjo	2 hari	2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		12 hari			
				Pembina JBM	4 bulan	4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		24 bulan			
				Pembinaan Kelurahan Siaga	4 bulan	4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		24 bulan			
				Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang			
				Sosialisasi Ketahanan Pangan	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang			
				Sarsehan Mocopat	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali			
				Pelatihan Perencanaan Bagi Kader PKK	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang			
				Pelatihan Packaging	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang			
				Gelar Poetnsi Diftabel	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Penyuluhan Pengelola UKS	60 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		360 org			
				Penyuluhan PKH	300 orang	300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		1800 orang			
		02.07.13.062.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 42 RT	4 bulan, 42 RT		10 bulan, 42 RT		10 bulan, 42 RT		10 bulan, 42 RT		10 bulan, 42 RT		10 bulan, 42 RT		54 bulan 252 RT			
				Jam Belajar Masyarakat	13 RW	13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		78 RW			
				Workshop RW Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali			
				Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		78 RW			
				sarasehan PKK RT	42 RT	42 RT		42 RT		42 RT		42 RT		42 RT		42 RT		252 RT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180		
				Penyusunan RPJMD Kelurahan Giwangan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan		
				Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang		
				Worshop Kampung Wisata	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				BIMTEK Kampung Wisata	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang		
				Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K	70 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		420 orang		
				Sosialisasi Hatinya PKK dan PHBS	70 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		420 orang		
				Gebyar Lansia	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang		
				Upaca Adat Nyadran	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Pelatihan Sablon Tingkat Dasar	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
		02.07.13.062.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 70 RT	4 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		10 bulan, 70 RT		54 bulan 420 RT		
				Jam Belajar Masyarakat	18 RW	18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		108 RW		
				Sosialisasi RW Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali		
				Sarasehan PKK RW	18 RW	18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		18 RW		108 RW		
				Sarasehan PKK RT	70 RT	70 RT		70 RT		70 RT		70 RT		70 RT		70 RT		70 RT		420 RT		
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan makanan tradisional)	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang		
				Penyusunan RPJMD Kelurahan Sorosulan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan		
				Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	250 orang	250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		1500 orang		
				Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				Pelatihan Rias Karakter	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan hantaran Manten Tingkat Lanjut	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Pembuatan Blankon	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Pembuatan sekam untuk Media Tanam	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK)	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Gerakan Sapaan Anak Kos	18 RW, 4 bulan	18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		18 RW, 4 bulan		108 RW		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		02.07.13.062.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Panen Raya (April dan Desember)	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		12 kali				
				Gebyar Lansia	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang		
				Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 4 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		1 kali, 10 bulan 52 RT		54 bulan 260 RT		
				Jam Belajar Masyarakat	8 bln	8 bln		8 bln		8 bln		8 bln		8 bln		8 bln		8 bln		48 bulan		
				Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali		
				Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		78 RW		
				Sarasehan PKK RT	52 RT	52 RT		52 RT		52 RT		52 RT		52 RT		52 RT		52 RT		312 RT		
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		240 orang		
				Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan		
				Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				Worshop Sosio Entrepreneurship	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
			Gelar Potensi Anak	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		900 orang			
			Lomba Futsal Karang Taruna	13 RW	13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		78 RW			
		02.07.13.062.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe	22 orang	22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		132 orang		
				Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca	22 orang	22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		132 orang		
				Promosi hasil Karya	1 hari	1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		6 hari		
				Pelatihan Bisnis Berbasis Web	22 orang	22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		22 orang		132 orang		
				Sosialisasi Kesehatan Lansia	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		300 orang		
				Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Solusinya	70 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		420 orang		
				Gelar Potensi PAUD	110 orang	110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		110 orang		660 orang		
				Pelatihan Daur Ulang Sampah	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Gelar Senam Suka-suka	300 orang	300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		1800 orang		
				Gelar Potensi lansia	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali		
				Pelatihan Membuat Tas Rajut	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		120 orang		
				Jam Belajar Masyarakat	9 RW	9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		9 RW		54 RW		
				Lomba Balita Tingkat Kelurahan	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		600 orang		
				Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 4bulan		1 kali, 10 bulan		54 buan												
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		8 bulan		48 bulan		
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar)	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang		
				Sarasehan PKK dan	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		25 kali		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		02.07.13.062.009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Koordinasi PKK Kelurahan																		
				Sarasehan PKK RW	9 RW	9 RW			9 RW		54 RW											
				Sarasehan PKK RT	38 RT	38 RT			38 RT		228 RT											
				Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 4bulan			1 kali 10 bulan		54 bulan											
				Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW			12 RW		72 RW											
				Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			1 kali		6 kali											
				Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan	1 kali	1 kali			1 kali		6 kali											
				Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			5 kali		30 kali											
				Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			12 RW		72 RW											
				Sarasehan PKK RT	50 RT	50 RT			50 RT		300 RT											
				Intervensi Penduduk Rentan /Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar bagi Pemegang KMS)	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			8 bulan		48 bulan											
				Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang			200 orang		1200 orang											
				Sarasehan Budaya Jawa	50 orang	50 orang			50 orang		300 orang											
			Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan	100 buku	100 buku			100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		100 buku		600 buku				
			Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang				
			Pelatihan Jemputan Warna Alam	30 orang	30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang				
			Pelatihan Batik Tulis	30 orang	30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang				
			Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal Batik	30 orang	30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		180 orang				
		02.07.13.062.009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju	Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 4 bulan			1 kali 10 bulan		54 bulan											
				Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW			12 RW		72 RW											
				Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			1 kali		6 kali											
				Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			5 kali		30 kali											
				Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			12 RW		72 RW											
				Sarasehan PKK RT	55 RT	55 RT			55 RT		330 RT											
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan makanan dari Umbi-Umbian)	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											
				Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju	1 kali	1 kali			1 kali		6 kali											
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			8 bulan		48 bulan											
				Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang			200 orang		1200 orang											
				Pelatihan Manajemen Usaha	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											
				Worshop Kesehatan Bagi Lansia	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											
				Pelatihan Pembuatan Ecobrik	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											
				Pelatihan Pembuatan	30 orang	30 orang			30 orang		180 orang											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode restra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Makanan dari ikan	50 orang	50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			300 orang		
				Workshop Posyandu	50 orang	50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			300 orang		
				Gelar Senam PKK	4 kali	4 kali			4 kali			4 kali			4 kali			4 kali			24 kali		
				Workshop Parenting PAUD	65 orang	65 orang			65 orang			65 orang			65 orang			65 orang			390 orang		
				Workshop PIK R	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
				Pelatihan SDIDTK	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
				Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
				Workshop Kampung Cyber	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
				Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
		02.07.13.062.010	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Penyuluhan dan pemantauan Jenitik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 4 bulan			1 kali, 10 bulan			1 kali, 10 bulan			1 kali, 10 bulan			1 kali, 10 bulan			54 bulan		
				Jam Belajar Masyarakat	10 RW	10 RW			10 RW			10 RW			10 RW			10 RW			60 RW		
				Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			1 kali			1 kali			1 kali			1 kali			6 kali		
				Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			5 kali			5 kali			5 kali			5 kali			30 kali		
				Sarasehan PKK RW	10 RW	10 RW			10 RW			10 RW			10 RW			10 RW			60 RW		
				Sarasehan PKK RT	34 RT	34 RT			34 RT			34 RT			34 RT			34 RT			204 RT		
				Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan Kue)	30 orang	30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			30 orang			180 orang		
				Penyusunan RPJMD Kelurahan Semaki	1 kali	1 kali			1 kali			1 kali			1 kali			1 kali			6 kali		
				Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			8 bulan			8 bulan			8 bulan			8 bulan			48 bulan		
				Pelatihan Hydroponik	20 orang	20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			120 orang		
				Pelatihan Pembuatan Bakpia	20 orang	20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			120 orang		
				Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita	20 orang	20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			20 orang			120 orang		
				Gelar Potensi PAUD	100 orang	100 orang			100 orang			100 orang			100 orang			100 orang			600 orang		
				Pelatihan Kegawat Daruratan	50 orang	50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			300 orang		
				Gelar Potensi Lansia	100 orang	100 orang			100 orang			100 orang			100 orang			100 orang			600 orang		
		02.07.13.062.011	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 dokumen	8 dokumen			8 dokumen			8 dokumen			8 dokumen			8 dokumen			48 dokumen		
				Perbaikan Paving Blok	6 bulan	6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			36 bulan		
				Perbaikan SAH	6 bulan	6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			36 bulan		
				Perbaikan balai RW	6 bulan	6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			36 bulan		
				Pemasangan Kanopi Ex Balai RK	1 paket	1 paket			1 paket			1 paket			1 paket			1 paket			6 paket		
				Pemeliharaan taman Apotik Hidup	1 paket	1 paket			1 paket			1 paket			1 paket			1 paket			6 paket		
				Pemeliharaan PUJ	7 kelurahan	7 kelurahan			7 kelurahan			7 kelurahan			7 kelurahan			7 kelurahan			28		
				Pelatihan Perencanaan	102 orang	102 orang			102 orang			102 orang			102 orang			102 orang			612 orang		
				Pelatihan Kader Pembangunan	35 orang	35 orang			35 orang			35 orang			35 orang			35 orang			210 orang		
				Profil Kecamatan dan Kelurahan	4 bulan	4 bulan			4 bulan			4 bulan			4 bulan			4 bulan			24 bulan		
				Informasi Pembangunan Wilayah	6 bulan	6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			6 bulan			36 bulan		
				Gelar Expo Industri	3 hari, 7 kel	3 hari, 7 kel			3 hari, 7 kel			3 hari, 7 kel			3 hari, 7 kel			3 hari, 7 kel			18 hari, 28 kel		
				Penyuluhan PKL	400 orang	400 orang			400 orang			400 orang			400 orang			400 orang			2400 orang		
				Penyuluhan Pemilik Pondokan	200 orang	200 orang			200 orang			200 orang			200 orang			200 orang			1200 orang		
				Sosialisasi bahan makanan	50 orang	50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			50 orang			300 orang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Berbahaya Koordinasi UMKM		11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	66 bulan				